ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS PENDAPATAN DI WILAYAH PENGEMBANGAN PROBOLINGGO–LUMAJANG PERIODE 2010–2019

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh:

Aditya Pratama
165020101111053

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS PENDAPATAN DI WILAYAH PENGEMBANGAN PROBOLINGGO–LUMAJANG PERIODE 2010–2019

Aditya Pratama
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email : withaditya@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas pendapatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Wilayah Pengembangan Probolinggo–Lumajang pada *periode 2010-2019. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif, analisis Indeks Williamson, analisis Tipologi Klassen, dan analisis korelasi sera analisis regresi data panel dengan commond effect model.*

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui analisis deskriptif, wilayah Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang secara sektor ekonomi saling mendukung. *Berdasarkan analisis Indeks Williamson* diketahui bahwasanya dalam lingkup WP Probolinggo–Lumajang masih terdapat ketimpangan dengan intensitas rendah. *Berdasarkan analisis Tipologi Klasen, ketiga daerah dalam* WP Probolinggo–Lumajang *diklasifikasikan sebagai daerah relatif tertinggal. Berdasarkan analisis korelasi yang dilakukan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo sebagai pusat wilayah pertumbuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah pendukungnya*

Sedangkan melalui analisis regresi data panel, secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan faktor yang berpengaruh signifikan dan linier terhadap terjadinya disparitas pendapatan di Wilayah Pengembangan Probolinggo–Lumajang.

Kata Kunci : Disparitas Pendapatan, Faktor-Faktor, dan WP Probolinggo-Lumajang.

A. PENDAHULUAN

Dengan wilayah yang luas, pembangunan di Indonesia tidak mungkin bisa berjalan dengan baik apabila pemrakarsa dan perencanaannya bertumpu pada pemerintahan pusat. Oleh karena itulah, otonomi daerah saat ini memberikan ruang bagi daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota untuk melaksanakan pembangunan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Todaro (2010), pembangunan dalam pelaksanaannya memiliki dua tujuan utama, yakni mendongkrak pertumbuhan ekonomi namun juga memberikan pemerataan bagi masyarakat. Salah satu provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik adalah Provinsi Jawa Timur. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selalu berada diatas rata-rata nasional pada periode 2010 hingga 2019.

Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011–2031 membagi daerahnya menjadi 8 (delapan) Wilayah Pengembangan. Wilayah Pengembangan atau yang kemudian disebut WP dibentuk berdasarkan kesamaan fungsi pengembangan ekonominya serta

berguna untuk mendistribusikan pembangunan disuatu kawasan dan untuk memotivasi wilayah pendukung (*hinterland*) dalam hal pertumbuhan wilayah.

Salah satu dari satuan WP tersebut adalah WP Probolinggo–Lumajang, yang terdiri dari Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang dengan Kota Probolinggo sebagai pusatnya. Dilihat dari lokasinya, WP Probolinggo–Lumajang bersebelahan langsung dengan WP Gerbangkertosusila Plus, yang mana merupakan pusat ekonomi Jawa Timur dan gerbang perekonomian Indonesia Timur.

Data BPS pada tahun 2013 hingga 2019 menunjukkan bahwasanya hanya Kota Probolinggo dalam WP Probolinggo–Lumajang, yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Jawa Timur. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya (2010 hingga 2012) Kota Probolinggo bersama Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata provinsi. Fenomena ini menunjukkan adanya indikasi ketimpangan pada WP Probolinggo–Lumajang walaupun memiliki potensi ekonomi yang strategis.

Adapun dalam hal pendapatan per kapita penduduk, daerah dalam lingkup WP Probolinggo–Lumajang memiliki perbedaan output yang sangat besar. PDRB per kapita antara Kota Probolinggo dengan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 memiliki selisih 15 juta rupiah lebih. Sementara pada tahun yang sama Kota Probolinggo dengan Kabupaten Lumajang memiliki perbedaan pendapatan per kapita penduduk sebesar 12 juta rupiah lebih.

B. LANDASAN TEORI

Teori Disparitas Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah hanya terjadi pada beberapa pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda, pertumbuhan tersebut juga tidak muncul dalam waktu bersamaan. Menurut Tarigan (2008), teori pusat pertumbuhan (*Pole Growth)* menjadi pilihan yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan dalam menyusun kebijakan pembangunan suatu daerah.

Terdapat empat karakteristik dalam teori pusat pertumbuhan, yakni : (1) aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada tempat tertentu, (2) aktivitas tersebut mampu mendorong pertumbuhan perekonomian yang dinamis, (3) pusat perekonomian mempunyai keterkaitan yang kuat antara input dan output, serta (4) pengembangan ekonomi didorong oleh adanya industri induk. Dikutip dari Bappneas (2006), konsep pembangunan berbasis wilayah sejatinya dapat dijabarkan melalui pengembangan berbasis kesamaan potensi sumber daya, berbasis kerjasama antar sektor ekonomi, serta berbasis klaster dan penataan ruang.

Dalam perekonomian, ketimpangan secara sederhana dapat digambarkan dengan adanya daerah maju dan daerah kurang maju dalam suatu daeah. Hal itu disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam serta perbedaan kondisi demografi antar wilayah. Kharakteristik alamiah tersebut yang kemudian biasa disebut faktor anugerah awal. Kuncoro (2006) menjelaskan faktor itulah yang pada akhirnya menyebabkan pembangunan setiap wilayah kondisinya berbeda serta memunculkan jurang kesejahteraan atau disparitas dalam wilayah tersebut.

Simon Kuznets melalui Jhingan (2010) menjelaskan dalam Hipotesa U Terbaliknya, bahwasanya pada tahap awal pembangunan, akan terdapat peningkatan ketimpangan antar daerah, yang pada suatu waktu akan mengalami penurunan ketimpangan atau disparitas. Simon Kuznet juga menjelaskan faktor yang memiliki pengaruh kuat terhadap perubahan kurva U adalah adanya

perubahan struktur ekonomi masyarakat dari yang semula berkutat pada sektor pertanian kemudian beralih menuju sektor industri. Hal tersebut menyebabkan golongan masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita relatif lebih tinggi jumlahnya bertambah. Ketimpangan antar daerah juga dijelaskan oleh Myrdral (1957). Teori ini menjabarkan penggunaan *spread effect* dan *backwash ieffect* sebagai pengaruh penjalaran dari pusat pertumbuhan menuju daerah sekitar.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan analisis deskriptif, analisis Indeks Williamson, analisis Tipologi Klassen, analisis korelasi untuk mengukur disparitas pendapatan serta analisis regresi data panel dengan metode *common effect model untuk* mengukur beberapa faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap disparitas pendapatan. Penelitian ini menggunakan WP dalam lingkup Provinsi Jawa Timur sebagai populasi peneltian dengan WP Probolinggo–Lumajang sebagai sampel penelitian, yang terdiri dari Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang yang diamati selama 10 tahun dari tahun 2010 hingga 2019.

Definisi Operasional

Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Indeks Williamson (Y), Indeks Williamson yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan data-data pendukung seperti PDRB per kapita dan jumlah penduduk. Indeks Williamson dipilih sebagai variabel dependen karena penggunaannya yang mudah dan praktis dalam melihat ketimpangan.
b) Data belanja pemerintah (X1), data belanja pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini berupa belanja daerah dalam satuan milyar rupiah.
c) Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X2), data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dalam penelitian ini akan menggunakan skala pengukuran yang telah ditetapkan BPS berupa satuan persen.
d) Data Indeks Pembangunan Manusia (X3), data Indeks Pembangunan Manusia yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penetapan BPS dengan skala 0-100 yang dapat disamakan dengan persen.
e) Data panjang jalan (X4), dalam penelitian ini digunakan data panjang jalan menurut kewenangan provinsi dalam satuan km. Panjang jalan menurut kewenangan nasional tidak digunakan dikarenakan panjangnya yang tetap dari tahun ke tahun dan juga penambahan ruas jalan tol yang termasuk jalan nasional di jawa timur hanya terjadi pada tahun 2019 dan hanya melewati Kabupaten Probolinggo saja.
f) Data jumlah penduduk (X5), data penduduk dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran berupa nominal dengan satuan ribu jiwa.
g) Data Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) (X6), dalam penelitian ini digunakan laju pertumbuhan upah minimum yang berupa persen.

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

a. Karakter dan Peran Daerah dalam WP Probolinggo–Lumajang

Daerah	Karakter	Peran
Kota Probolinggo	- Masyarakat urbanis dengan Suku Madura dan Jawa yang terkenal ulet, tegas, terbuka, dan kuat - Kota administratif - Pusat infrastruktur yang lengkap - Sektor unggulan : sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa	- Sebagai wilayah pusat di WP Probolinggo–Lumajang - Kota administratif sebagai kontrol dan distribusi atas produk pertanian dan perikanan dari wilayah pendukungnya - Pusat infrastruktur yang lengkap yang dapat menunjang pembangunan wilayah pendukungnya
Kabupaten Probolinggo	- Terletak di wilayah tapal kuda dimana suku yang mendominasi adalah Madura dan Jawa yang terkenal ulet, tegas, terbuka, dan kuat - Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar wilayahnya difungsikan sebagai ladang pertanian - Sektor unggulan: sektor pertanian, pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa, sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan, dan sektor perdagangan - Memiliki aset tempat wisata alam Gunung Bromo yang popularitasnya mendunia dan Suku Tengger yang merupakan kearifan lokal yang dimilikinya	- Sebagai wilayah pendukung di WP Probolinggo–Lumajang - Sebagai wilayah pemasok kebutuhan pangan baik dari sektor pertanian, perikanan maupun sektor lainnya karena potensi sumber daya alamnya yang besar - Keberadaan Gunung Bromo dan Suku Tengger menjadikan wilayah Kabupaten Probolinggo sebagai destinasi wisata turis domestik maupun mancanegara
Kabupaten Lumajang	- Karakter wilayah relatif beragam (pertanian, perkebunan, wilayah hutan, dan sebagainya) - Memiliki kawasan hutan yang cukup luas karena berada di kaki Pegunungan Semeru, dimana hutan selain difungsikan sebagai hutan produksi juga difungsikan sebagai hutan lindung - Terletak di kaki gunung sehingga material gunung seperti pasir, batu, dan kerikil sangat besar potensinya	- Sebagai wilayah pendukung di WP Probolinggo–Lumajang - Sebagai wilayah produksi kebutuhan pangan karena karakteristik wilayah dan sumber daya alamnya bervariasi - Sebagai kawasan pertambangan material pegunungan yang sangat potensial

Sumber : Berbagai Dta, diolah

Berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki, Kota Probolinggo memiliki peran penting dalam pembangunan di WP Probolinggo–Lumajang yakni bertindak sebagai wilayah pusat pengembangan yang dapat mempengaruhi pembangunan di wilayah pendukungnya. Kabupaten Probolinggo dalam WP Probolinggo–Lumajang bertindak sebagai wilayah pendukung dimana memiliki peran dalam memasok kebutuhan pangan wilayahnya maupun wilayah lain baik dari sektor pertanian, perikanan maupun sektor lainnya. Kabupaten Lumajang memiliki peran yang hampir serupa dengan Kabupaten Probolinggo yakni sebagai wilayah produksi kebutuhan pangan karena karakteristik wilayah dan sumber daya alamnya bervariasi, sebagai kawasan lindung karena masih memiliki luasan hutan di kaki Pegunungan Semeru, dan sebagai kawasan pertambangan material pegunungan yang sangat potensial.

b. Kondisi Variabel yang Diduga Berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan di WP Probolinggo–Lumajang Periode 2010-2019

Variabel	Kota Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Lumajang
Belanja Pemerintah	Rata-rata belanja sebesar 755,85 milyar rupiah	Rata-rata belanja sebesar 1.647,41 milyar rupiah	Rata-rata belanja sebesar 1506,04 milyar rupiah
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Rata-rata: 65,12 %	Rata-rata: 70,39 %	Rata-rata: 65,77 %
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rata-rata: 70,75 %	Rata-rata: 62,98 %	Rata-rata: 62,7 %
Panjang Jalan Provinsi	Rata-rata: 1227 km	Rata-rata: 37,61 km	Rata-rata: 38,50 km
Jumlah Penduduk	Rata-rata: 227,64 ribu jiwa	Rata-rata: 1.135,35 ribu jiwa	Rata-rata: 1.027,29 ribu jiwa
Laju Perkembangan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK)	Rata-rata: 12,19 %	Rata-rata: 13,19 %	Rata-rata: 10,96 %

Sumber : BPS, diolah

Perbandingan masing-masing daerah di WP Probolinggo–Lumajang berdasarkan enam variabel yang diamati diketahui bahwa belanja pemerintah tertinggi oleh Kabupaten Probolinggo disusul Kabupaten Lumajang kemudian Kota Probolinggo. Belanja pemerintah juga dipengaruhi oleh banyaknya kebutuhan seperti membangun infrastruktur dan sebagainya sehingga semakin besar luas wilayah dan penduduk juga berdampak kepada jumlah pembelanjaan yang harus dilakukan pemerintah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi adalah Kabupaten Probolinggo disusul Kabupaten Lumajang kemudian Kota Probolinggo. Besarnya persentase TPAK tidak selalu dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut maju secara ekonomi karena besarnya dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berada pada usia kerja. Kabupaten Probolinggo memiliki jumlah penduduk terbanyak jika dibandingkan dengan Kabupaten Lumajang dan Kota Proboliggo. Sedangkan

pada variabel panjang jalan provinsi terbanyak pada Kabupaten Lumajang hal ini dikarenakan pembuatan jalur lintas selatan di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Lumajang dilakukan beberapa tahun terakhir.

Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan laju pertumbuhan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK), Kota Probolinggo unggul diikuti wilayah pendukung hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia di perkotaan cenderung lebih baik karena akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan faktor lain lebih mudah dicapai (Supadi dan Pudjianto, 2011). Variasi nilai pada variabel-variabel ekonomi tersebut terjadi karena masing-masing daerah memiliki hak otonomi untuk membangun daerahnya masing-masing dan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung sehingga ketimpangan pendapatan tidak dapat benar-benar dihilangkan namun dapat dikurangi.

Analisis Indeks Williamson

Tahun	Indeks Williamson
2010	0,1282
2011	0,1939
2012	0,1906
2013	0,1940
2014	0,1948
2015	0,2018
2016	0,2047
2017	0,2080
2018	0,2116
2019	0,2196
Rata-Rata	0,1947

Sumber : Berbagai data, diolah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Indeks Williamson yang terjadi setiap tahunnya cenderung bervariasi dengan rata-rata sebesar 0,1947. Artinya pada WP Probolinggo–Lumajang masih terdapat ketimpangan pendapatan meskipun intensitasnya rendah. Kabupaten atau Kota memiliki hak otonomi untuk mengembangkan daerah masing-masing sesuai karakteristik dan potensi yang ada sehingga cenderung terdapat perbedaan satu sama lain (Kurniawan, 2005).

Analisis Tipologi Klassen

PDRB Per Kapita (Y) / Laju Pertumbuhan (r)	Yi > y	Yi < y
R i > r	**Kuadran I**	**Kuadran III**
R i < r	**Kuadran II**	**Kuadran IV** Kota Probolinggo : Kabupaten Probolinggo Kabupaten Lumajang

Catatan : Ri : Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota (persen)
r : Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur (persen)
Yi : PDRB per kapita kabupaten atau kota (juta rupiah)
y : PDRB per kapita rata-rata Provinsi Jawa Timur (juta rupiah)

Dimana r Jawa Timur : 5,64
Ri Kota Probolinggo : 33,52
Ri Kabupaten Probolinggo : 5,51
Ri Kabupaten Lumajang : 5,27
y Jawa Timur : 5,23
Yi Kota Probolinggo : 28,17
Yi Kabupaten Probolinggo : 16,78
Yi Kabupaten Lumajang : 18,00
Sumber : Berbagai Data, diolah

Analisis Korelasi

Pengaruh Kota Probolinggo terhadap	R_w	Keterangan	Signifikansi (r = 0,632)
Kabupaten Probolinggo	-0,5505	$R_w < r$	Tidak signifikan
Kabupaten Lumajang	-0.3009	$R_w < r$	Tidak signifikan

Sumber : Berbagai Data, diolah

a. Kontribusi Kota Probolinggo terhadap Kabupaten Probolinggo

Hasil koefisien korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo dengan Kabupaten Probolinggo adalah -0,5505. Artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi Kota probolinggo akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Probolinggo. Sayangnya bentuk pengaruh yang terjadi tidak signifikan karena nilai koefisien Rw kurang dari nilai r yakni 0,632 untuk sampel berjumlah 10.

b. Kontribusi Kota Probolinggo terhadap Kabupaten Lumajang

Koefisien korelasi yang ditemukan dalam hubungan antara laju pertumbuhan Kota Probolinggo dengan Kabupaten Lumajang adalah -0,3009. Artinya semakin besar laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo akan menurunkan laju pertumbuhan pada Kabupaten Lumajang karena hubungannya berbanding terbalik satu sama lain. Sayangnya hubungan yang terjadi bersifat tidak signifikan karena nilai Rwkurang dari nilai r yakni 0,632 untuk sampel berjumlah 10. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Hardjono (2007), bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah pusat dengan wilayah pendukungnya saling mempengaruhi satu sama lain secara keseluruhan karena adanya aktivitas ekonomi yang saling berkaitan.

Analisis Regresi Data Panel

a. Pemilihan Model Terbaik (Uji Lagrange Multipier)

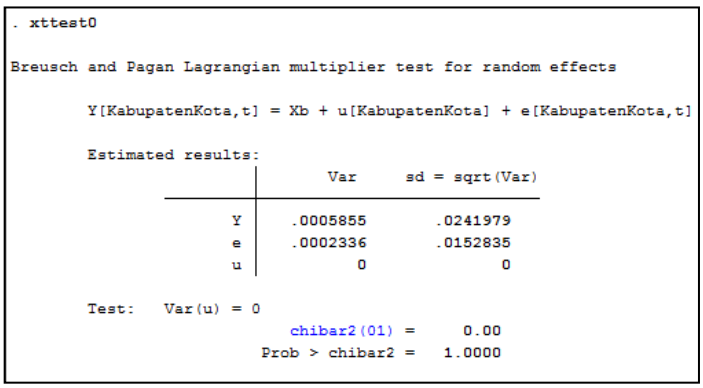

```
. xttest0

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

        Y[KabupatenKota,t] = Xb + u[KabupatenKota] + e[KabupatenKota,t]

        Estimated results:
                         |       Var     sd = sqrt(Var)
                ---------+------------------------------
                       Y |    .0005855        .0241979
                       e |    .0002336        .0152835
                       u |          0                0

        Test:   Var(u) = 0
                                  chibar2(01) =     0.00
                              Prob > chibar2 =   1.0000
```

Sumber : Berbagai Data, diolah

b. Hasil Regresi Data Panel Pendekatan CEM *(Common Effect Model)*

```
. reg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6

      Source |       SS       df       MS      Number of obs   =        30
-------------+------------------------------   F(6, 23)        =      8.61
       Model |  .011750801     6  .001958467   Prob > F        =    0.0001
    Residual |  .005229818    23  .000227383   R-squared       =    0.6920
-------------+------------------------------   Adj R-squared   =    0.6117
       Total |  .016980618    29  .000585539   Root MSE        =    .01508

------------------------------------------------------------------------------
           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          X1 |    4.98e-06   .0000172     0.29   0.775    -.0000306    .0000406
          X2 |    .0006589   .0011958     0.55   0.587    -.0018147    .0031326
          X3 |    .0101312   .0033027     3.07   0.005     .003299     .0169634
          X4 |   -.0001095   .0000587    -1.86   0.075    -.0002309     .000012
          X5 |   -.0000685   .0000861    -0.80   0.434    -.0002466    .0001096
          X6 |    .0005017   .0004497     1.12   0.276    -.0004285    .0014319
       _cons |   -.4224178   .2023435    -2.09   0.048    -.8409972   -.0038383
------------------------------------------------------------------------------
```

Sumber : Berbagai Data, diolah

c. Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien (β)	*P-Value* (sig. t)	Signifikansi (α = 0,05)
Konstanta	-0,4224178	0,048	-
Belanja Pemerintah	0,00000498	0,775	Tidak signifikan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0,0006589	0,587	Tidak signifikan
Indeks Pembangunan Manusia	0,0101312	0,005	Signifikan
Panjang Jalan Provinsi	-0,0001095	0,075	Tidak signifikan
Jumlah Penduduk	-0,0000685	0,434	Tidak signifikan
Upah Minimum Kabupaten Kota	0,0005017	0,276	Tidak signifikan
Prob F-Statistik		0,00001	Signifikan
R^2		0,6920	-

Sumber : Berbagai Data, diolah

d. Persamaan Model Regresi

$$\mathbf{Y_{it} = 0{,}00000498X_{1it}^{*} + 0{,}0006589X_{2it} + 0{,}0101312X_{3it}^{**} - 0{,}0001095X_{4it}^{*} - 0{,}0000685X_{5it} + 0{,}0005017X_{6it} - 0{,}4224178 + e_{it}}$$

Catatan :
* signifikan pada α = 10%
** signifikan pada α = 5%
*** signifikan pada α = 1%
Dimana

Y	: Indeks Williamson
β_0	: Konstanta
β_1 β_2 β_3 β_4 β_5 β_6	: Koefisien Variabel Independen
X_1	: Belanja Pemerintah
X_2	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
X_3	: Indeks Pembangunan Manusia
X_4	: Panjang Jalan Provinsi
X_5	: Jumlah Penduduk
X_6	: Upah Minimum
e	: *Error*
i	: data *cross-section* di WP Probolinggo–Lumajang
t	: data *time-series*, tahun 2010–2019
Sumber	: Penulis, diolah

Berdasarkan estimasi regresi data panel yang telah dilakukan menggunakan *common effect model* diketahui bahwa hanya satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di WP Probolinggo–Lumajang diantara enam variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini. Variabel independen yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di WP Probolinggo–Lumajang.

Koefisien Indeks Pembangunan Manusia yang didapatkan dalam penelitian ini bertanda positif yakni sebesar 0,0101312 yang artinya kenaikan IPM sebesar 1% akan meningkatkan disparitas pendapatan di WP Probolinggo-Lumajang sebesar 0,0101312%.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Hartini (2017) bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan dan berpengaruh positif terhadap pemerataan pendapatan.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

a. Tingkat disparitas pendapatan di WP Probolinggo–Lumajang memiliki intensitas rendah namun ketiga daerah didalamnya tergolong daerah yang relatif tertinggal. Temuan tersebut apabila dikaitkan dengan teori U Terbalik Kuznet, maka suatu disparitas yang bersifat rendah terjadi dalam dua kondisi, yakni pembangunan daerah baru saja diselenggarakan atau pembangunan daerah telah lama dilaksanakan namun sasaran yang dituju relatif kurang tepat. Pada tahun 2019 dimana observasi penelitian penulis berakhir, pemberlakuan Otonomi Daerah seluas-luasnya telah berlaku selama 14 tahun sejak Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan. Dapat diasumsikan bahwasanya pembangunan yang telah dilaksanakan pada daerah dalam lingkup WP Probolinggo–Lumajang memiliki sasaran yang kurang tepat Sehingga perlu perhatian kembali kepada Rencana Pembangunan Daerah baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang serta perhatian lebih lanjut kepada APBD wilayah yang bersangkutan.

b. Variabel Indeks Pembanguan Manusia yang dalam penelitian ini sebagai faktor yang signifikan terhadap disparitas pendapatan dapat dikaitkan dengan Teori Myrdal (1957) melalui pendekatan *backwash effect*. Teori tersebut menjelaskan bahwasanya terdapat pengaruh merugikan apabila modal pembangunan dalam bentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas meninggalkan wilayah pinggiran menuju pusat-pusat pertumbuhan. Dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia pada pusat pertumbuhan akan meningkat sementara pada wilayah pendukung jumlahnya menurun. Hal tersebut akan menyebabkan daerah pendukung atau *hinterland* kekurangan sumber daya manusia berkualitas dalam membangun daerahnya, yang kemudian berakibat pada pembangunan serta pemerataan ekonomi masyarakat terhambat.

Saran

a. Saran Bagi Pemerintah Kabupaten atau Kota Terkait

Upaya-upaya untuk mengontrol Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu dilakukan karena IPM merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi disparitas pendapatan secara positif atau dapat meningkatkan ketimpangan pada daerah tersebut. Kedepannya diharapkan pemerataan pembangunan dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan karena merupakan poin penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah tersebut.

b. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya.

Bagi penelitian lanjutan yang akan dilakukan diharapkan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap disparitas pendapatan, hal ini dikarenakan pengaruh yang diberikan tidak sesuai dengan teori dan penelitian pendahulu yang ada. Selain itu, perlu adanya penambahan variabel-variabel lainnya yang eksis seiring terjadinya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat dalam satuan waktu seperti misalnya pengaruh dari adanya pandemi Covid-19, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Bapennas. 2006. Buku Pegangan 2006:Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembanguan Daerah. Jakarta

Hartini, N. T. (2017). pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan IPM terhadap Ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 53(9), 1–91. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.00

Hardjono. 2007. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Kota Terhadap Wilayah *Hinterland* di Kabupaten Blitar. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5, (No. 01): 37 – 46.

Jhingan, M.L. 2010. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..

Kuncoro, Mudrajat. 2006. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Pembaharuan.

Myrdal, Gunnar. 1957. Economic Theory and Underdeveloped Regions. by Gerald Duckworth & Co. Ltd

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2012. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011–2031. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D. Surabaya: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI, Nomor 125, Tahun 2004. Jakarta: Sekretariat Negara.

Surur, Fadhil, dkk. 2020. Analisis Interkasi Keruangan dalam Mendukung Optimalisasi Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan. Jakarta: Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Supadi dan Pudjianto, Hary. 2011. Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia di 35 Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah. Eko-Regional, Vol. 6, (No. 2) : 97 – 106.

Tarigan, Robinson. 2008. Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2010. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.